islamsantun.org issn: 2746-0657

Ketika Thaghut Dijadikan Senjata Melawan Negara

Oleh: Agus Wedi | Tanggal Upload: 22 November 2026



OPINI – Pada 2018, Karman dan Djoko Waluyo meneliti situs web Jamaah Ansharu Tauhid (JAT). Temuannya mengusik. Menurutnya, JAT memakai bahasa agama untuk meruntuhkan legitimasi pemerintah Indonesia.

Pemerintah dicap thaghut. Pemerintah digambarkan sebagai sosok jahat. Sementara pelaku terorisme dipuja sebagai orang terhormat. Negara, rumah bersama seluruh warga, dijadikan musuh.

Inilah politisasi istilah agamanya. Thaghut semula konsep teologis. Di tangan kelompok ekstrem, ia menjadi stempel untuk mencabut kewibawaan pemerintah.

Perihal ini, saya jadi teringat Aman Abdurrahman, bekas teroris kelas kakab di Indonesia. Aman melakukan stempel lewat tulisannya, *Ya, Polisi Memang Thaghut*. Begitu cap itu menempel, kritik berhenti menjadi kritik. Ia berubah menjadi kebencian ideologis.

Apakah ada literatur terkait yang mirip punya Aman? Jawabannya sangat banyak. Misalnya, buku *Ulasan Tuntas tentang Tiga Prinsip Pokok* karya Syaikh Muhammad bin Shalih

al-Utsaimin?

Buku itu membahas dasar-dasar akidah. Buku ini ditemukan di kamar para teroris. Buku ini ternyata sangat favorit di kalangan para kelompok teroris. Mengapa bisa jadi bacaan favorit?

Karena, buku ini menjelaskan thaghut sebagai segala sesuatu yang harus jelas dan ketat. Menurut buku ini, setiap hukum yang tidak bersumber dari syariat langsung divonis kufur, dan seluruh aparat negara masuk daftar musuh.

Namun, kalau kita mengecek literatur lain, argumen mereka lumpuh. Para ulama rujukan mereka justru mengerem. Ibn Utsaimin sendiri menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dihukumi kafir sebelum syarat pengkafiran terpenuhi pada dirinya.

Begitu juga Ibnu Taimiyah mengingatkan bahwa takfir memiliki syarat dan penghalang. Dewan Ulama Besar Arab Saudi bahkan pernah membahas bahaya takfir dan pengeboman, lengkap dengan darah yang tumpah akibatnya. Maka vonis thaghut yang diobral kepada polisi dan pejabat bukan sekadar keliru secara politik. Ia ceroboh secara ilmiah.

Islam di Indonesia juga punya jalan lain. Robert W. Hefner (2020) menunjukkan bahwa Pancasila menjadi kerangka kewargaan yang menjamin kesetaraan hak lintas agama. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berdiri di garda depan menjaganya. Muhammad Addi Fauzani (2021) menambahkan bahwa nilai hukum Islam bisa hadir lewat kerangka negara hukum Pancasila, tanpa merobohkan konstitusi.

Sikap resmi dua ormas terbesar pun terang. Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada 2015 menetapkan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, negara konsensus dan kesaksian. Lewat gagasan itu, Muhammadiyah menolak islamisme yang hendak mengubah dasar negara.

NU lebih dulu melangkah. Muktamar Situbondo 1984 menyatakan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk final. KH Achmad Siddiq menyebut Republik Indonesia sebagai upaya final seluruh bangsa, terutama kaum Muslimin, mendirikan negara. Ulama NU seperti Wahid Hasyim juga ikut merumuskan dasar negara itu. Menolak negara berarti menolak warisan para ulama sendiri.

Salah Berjihad?

Lalu bagaimana dengan klaim bahwa melawan negara adalah jihad? Ulama Indonesia sudah menjawabnya dua dekade silam. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004, yang ditandatangani 24 Januari 2004, mengharamkan terorisme dan menegaskan bahwa bom bunuh diri bukan jihad.

Kalau kita jeli, kita tahu bahwa fatwa itu juga menilai bom bunuh diri sebagai tindakan putus asa yang mencelakakan diri sendiri, baik di wilayah damai maupun wilayah perang. Hukum teror haram, entah pelakunya perorangan, kelompok, maupun negara.

Apa yang disebut pelaku sebagai mati syahid sejatinya bukan mati syahid. Surga tidak dibeli dengan darah sesama warga.

Ulama masa kini pun merumuskan ulang hubungan Muslim dan non-Muslim di negeri ini. Munas Alim Ulama NU 2019 di Banjar menilai non-Muslim di Indonesia tidak masuk salah satu dari empat kategori kafir dalam fikih klasik, yakni dzimmi, musta'man, mu'ahad, dan harbi.

Munas lebih memilih sebutan muwathin, warga negara dengan hak dan kewajiban setara. Keputusan ini memang memicu polemik, dan PBNU sendiri menyebutnya lebih sebagai ajakan. Namun arah ijtihadnya jelas: menegakkan kewargaan, bukan menyuburkan permusuhan.

Keputusan tersebut bukan mengada-ngada. Preseden historisnya pun ada. Piagam Madinah misalnya. Piagam ini disusun untuk mengurus penduduk yang berbeda kaum, bahasa, dan agama. Kajian kontemporer membacanya sebagai piagam tertulis pertama dalam Islam, kerangka konstitusional bagi sebuah polity berdaulat yang merangkul beragam kelompok etnis dan agama.

Tentu Madinah abad ke-7 adalah negara-kota kesukuan, sedangkan Indonesia negara-bangsa modern, sehingga keduanya tidak boleh disamakan begitu saja. Namun kedua tatanan itu sama-sama lahir dari kesepakatan inklusif untuk mengelola keragaman. Islam yang dicontohkan di Madinah tidak memusuhi keberagaman. Ia merangkulnya.

Al-Qur'an pun menutup pintu kebencian. Surah al-Ma'idah ayat 8 melarang kebencian terhadap suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Surah al-Mumtahanah ayat 8 memerintahkan kita berbuat baik dan adil kepada mereka yang tidak memerangi kita karena agama.

Indonesia memang tidak kebal kritik. Pemerintah boleh dikoreksi. Hukum boleh digugat. Kebijakan boleh ditolak. Tetapi lewat jalur yang sah: advokasi, demonstrasi damai, debat publik, pemilu, dan uji materi undang-undang. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan negara hukum, dan Pasal 29 ayat (2) menjamin kemerdekaan beragama.

Persoalannya, kebenaran saja tidak cukup. Fatwa MUI tentang terorisme tidak menjadi gerakan masif, sehingga doktrin bahwa bom bunuh diri adalah jihad tetap menjadi senjata ampuh bagi kelompok teroris untuk meyakinkan pengikutnya.

Kontra narasi harus hadir di ruang yang sama dengan propaganda: situs web, media sosial, majelis taklim, dan ruang kelas. Para ulama sendiri memandang perang melawan terorisme sebagai perang pemikiran.

Bagi saya, perang itu hanya bisa dimenangkan bila suara yang waras lebih lantang daripada suara yang membakar. Dan kita harus menjadi suara itu.

Dakwah yang baik adalah yang membangunkan warga untuk mengawasi kekuasaan. Dakwah baik bukan mengubah beda pendapat politik menjadi perang akidah.

Dakwah yang menanam kebencian kehilangan daya etiknya. Yang tumbuh bukan kemaslahatan, melainkan permusuhan terhadap rumah bersama kita. Jadi kita mau pilih yang mana?

Baca Artikel Asli di Website

Tentang islamsantun.org:
Portal media yang berdedikasi menyebarkan diskursus Islam yang ramah, moderat, dan *rahmatan lil 'alamin*. Menyajikan ragam artikel keislaman, opini, khutbah, hingga sastra pesantren, islamsantun.org hadir sebagai rujukan literasi keagamaan yang sejuk dan mencerahkan bagi masyarakat luas.

Ditulis oleh **Agus Wedi**

Pemimpin Redaksi Islamsantun.org dan Pengelola Komunitas Serambi Kata, Kamis sore di Masjid IAIN Surakarta (2016). Fokus kajian pada antropologi agama dan sosial.

#Thaghut #Kontranarasi

© 2026 islamsantun.org · Menyebarkan Islam yang rahmatan lil 'alamin